

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Globalisasi memungkinkan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat mudah. Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi lintas batas nasional dan regional. Ini diperlihatkan melalui pergerakan barang, informasi, jasa, modal dan tenaga kerja melalui perdagangan dan investasi. Sehingga dengan adanya globalisasi menjadi suatu yang penting bagi kehidupan pada saat ini yang mana memungkinkan terdapatnya lalu lintas manusia di seluruh dunia yang melintasi batas-batas negara. Berkat adanya globalisasi ini di Indonesia kini dapat dilihat banyak terdapat warga negara asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia dengan tujuannya masing-masing seperti berdagang, wisata, pendidikan, bisnis dan tujuan-tujuan yang lainnya yang menghasilkan banyak keuntungan bagi perekonomian dan aspek yang lainnya.

Dengan adanya globalisasi tak ayal menyadarkan kita juga akan pentingnya suatu keamanan yang bersifat nasional. Keamanan nasional memiliki fungsi akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang didalamnya tercantum rasa nyaman, damai, tentram dan tertib.<sup>1</sup> Keadaan tersebut

---

<sup>1</sup> Bambang Darmono, *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional, XV (1), April 2010

merupakan kebutuhan dasar setiap manusia pada setiap bangsa dan negara di dunia.

Keberadaan warga negara asing di Indonesia merupakan hal yang sudah lama terjadi. Sejak jaman penjajahan Belanda keberadaan warga negara asing di Nusantara dimanfaatkan untuk mengangkat perekonomian dan mengenalkan terhadap dunia luar tentang keanekaragaman kekayaan hayati di Nusantara pada saat itu. Perpindahan manusia melewati batas-batas negara sendiri merupakan suatu fenomena yang sangat penting pada era globalisasi yang membantu manusia sehingga mobilitas manusia semakin tinggi.

Mudahnya transportasi menjadikan lalu lintas antar batas-batas negara menjadi hal yang tidak mustahil. Dalam hal keimigrasian perpindahan satu orang dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadi sesuatu yang sudah biasa. Di Indonesia misalnya, siapapun dan dari negara manapun bisa masuk ke Indonesia. Harapannya adalah untuk memperkuat perekonomian dalam negeri melalui pariwisata dan sumber daya yang lainnya. Namun rasa keinginan yang berlebih seperti ingin tinggal di Indonesia tanpa atau mereka sadari telah melakukan tindakan pelanggaran tentang warga negara asing di Indonesia. Pada masa sekarang keberadaan warga negara asing di Indonesia diawasi lebih ketat. Selain menguntungkan negara Indonesia, keberadaan warga negara asing di Indonesia juga menjadi ancaman kedaulatan bangsa. Dalam hal ini keberadaan warga negara asing di Indonesia harus diawasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam berbagai aspek.

Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang kecuali negara-negara tertentu yang terdaftar bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS. Dengan adanya kebijakan bebas visa itu, Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar<sup>2</sup>. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan bebas visa juga memungkinkan munculnya kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang serta narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (3), Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Dalam hal penindakan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap keimigrasian di Indonesia. Tindakan pengawasan selain dilakukan terhadap warga negara Indonesia, juga dilakukan terhadap keberadaan warga negara asing yang akan atau sedang berada di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>2</sup><http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/09/kebijakan-bebas-visa-apa-manfaat-dan-untungnya-untuk-negara>, (diakses 23 Januari 2019, 23.46 wib).

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (3) tentang Keimigrasian

Adapun pengawasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan bahwa keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia sudah sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang diberlakukan. Aturan-aturan yang berlaku adalah melalui kebijakan dan perundangan yang menyangkut izin keberadaannya dan kegiatannya seperti sebagai ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, wisata dan lainnya. Adapun norma yang berlaku adalah norma agama, adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku di wilayah tertentu. Jika didapati pelanggaran, maka warga negara asing tersebut diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada prinsipnya, warga negara asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Untuk warga negara asing dikenakan pembatasan-pembatasan hak. Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya. Pendeportasian dan penyerahan kepada negara lain akan diberlakukan ketika didapati melakukan tindak pidana. Maka dari itu warga negara asing harus melakukan pendaftaran diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelanggaran warga negara asing di Indonesia biasanya berupa kelebihan ijin masa tinggal, narkoba, penyalahgunaan izin memperkerjakan warga negara asing dan lain-lain. Ada banyak bukti yang mengatakan bahwa pelanggaran warga negara asing di Indonesia terus ada setiap tahunnya. Hal ini menjadikan tugas bagi pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sepanjang tahun

2017 ditemui Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang ada di Indonesia<sup>4</sup>.

Tabel 1. Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017 di Indonesia

Negara	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian
China	1.621 orang
Vietnam	237 orang
Afghanistan	165 orang
Burma	102 orang
Nigeria	91 orang
Somalia	77 orang
<b>Jumlah</b>	<b>2.293 orang</b>

Sumber: “1.621 Warga Negara China Terkena Tindakan Administrasi Keimigrasian” *Tribunnews.com* 2017

Sedangkan sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh UPT Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian. Menurut Ronny F Sompie, RRT menjadi negara yang warga negaranya paling banyak dikenakan TAK, yaitu sebanyak 299 orang. Berturut-turut adalah Afganistan sebanyak 270 orang, Vietnam 261 orang, dan Nigeria 253 orang. Ronny menambahkan juga, warga negara Malaysia menempati urutan

<sup>4</sup> Berlian, Alija Fani. 2017. “1.621 Warga Negara China Terkena Tindakan Administrasi Keimigrasian” *Tribunnews.com*

kelima negara yang terbanyak dengan jumlah 147 orang. Di samping TAK, Penyidik Keimigrasian juga melakukan penindakan keimigrasian berupa tindakan pro justisia sebanyak 141 kasus<sup>5</sup>.

Permasalahan ini memang akan selalu ada mengingat kekayaan alam Indonesia, keindahannya dan berbagai aspek lainnya menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah yang nyaman bagi para warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Oleh sebab itu pengawasan keimigrasian menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Melalui Kantor Imigrasi Kelas I Malang seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sebagai lembaga untuk mengawasi kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 69 ayat (1) tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi terkait, baik dipusat maupun di daerah. Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora adalah badan atau instansi pemerintah yang melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Menindaklanjuti amanah pasal tersebut pada tanggal 23 Juni 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan rapat Timpora wilayah Kabupaten dan Kota Malang sekaligus meresmikan sekretariat Timpora sehingga tupoksi akan lebih efektif dan efisien. Pada tanggal 29 September 2017 Kantor Imigrasi Kelas I

---

<sup>5</sup><https://www.gatra.com/rubrik/nasional/371848-Penegakan-Hukum-Keimigrasian-Tiongkok-Paling-Banyak-Kena-Tindakan-Administratif> (diakses pada 25 Januari 2019)

Malang membentuk Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan di empat kota wilayah kerjanya yakni Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran administratif dari keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan adalah badan atau instansi pemerintah yang melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di tingkat kecamatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

Imigrasi kelas I Malang memperketat pengawasan orang asing hingga tingkat kecamatan<sup>6</sup>. Kepala Imigrasi Kelas I Malang, Novianto Sulastono SH MH mengungkapkan, hal ini dilakukan karena selama ini marak isu-isu upaya menggempur keutuhan NKRI dari luar yang memang banyak luput dari pantauan. Adapun instansi terkait yang anggotanya terdiri dari petugas kantor Imigrasi, Kepolisian, TNI, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat kecamatan ini untuk memudahkan koordinasi antar instansi karena pihak yang paling bersentuhan langsung dengan penduduk adalah para RT/RW dan desa. Sehingga dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat kecamatan akan lebih optimal dalam hal pengawasan. Pembentukan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing tingkat kota ataupun kabupaten yang juga merupakan instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat 42

---

<sup>6</sup> Sudiongko, Anggara. 2017. "Imigrasi Kelas 1 Malang Perketat Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan". *malangtimes.com* (di akses pada 25 September 2018)

kecamatan yang dibentuk dan tersebar di 4 kota yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat Kecamatan ini sendiri menjadi gambaran seriusnya pemerintah dalam mengawasi pelanggaran warga negara asing yang ada di Indonesia. Hal ini sangat perlu dilakukan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malang merupakan salah satu tujuan para wisatawan asing untuk berlibur. Dengan panorama keindahan alam dan banyaknya tempat wisata yang mudah diakses menjadikan surga bagi wisatawan asing untuk menghabiskan waktunya di Malang dan sekitarnya. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena dengan adanya wisatawan asing yang berkunjung maka akan memperkenalkan kepada dunia luar tentang keindahan alam di Indonesia dan Malang khususnya. Selain untuk tujuan wisata, keberadaan warga negara asing di Kota Malang juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Dengan banyaknya kampus dan sekolah tinggi di kota Malang, menjadikan keberadaan warga negara asing di Kota Malang untuk melakukan kegiatan pendidikan. Namun disamping itu ada pula pelanggaran yang dilakukan warga negara asing yang datang ke Malang. Seperti yang terjadi pada 17 Desember 2017 lalu yaitu ketika terdapat 143 tenaga kerja asing asal Cina yang ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Malang di Hotel Sahid Montana. Mereka diduga melakukan penyalahgunaan visa yang diperoleh.

Berdasarkan catatan dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang, selama bulan Januari 2018 terdapat 16 pelanggaran, kemudian pada bulan Februari di tahun yang sama terdapat 11 pelanggaran. Selanjutnya pada bulan Maret dan April



secara berurutan terjadi penurunan angka yaitu lima dan empat kasus pelanggaran. Pelanggaran paling banyak adalah adanya warga negara asing yang *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang banyak ditemukan pada mahasiswa asing yang menempuh studi di Malang, dan beberapa pendeportasian yang dikarenakan mereka menyalahgunakan visa. Bagi warga negara asing yang kedapatan *overstay* akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 per harinya. Sedangkan pendeportasian dilakukan bagi yang tidak mampu membayar denda. Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Donny Prasetyo Utomo mengatakan bahwa pada bulan Februari dilakukan pendeportasian terhadap dua warga negara asing yang melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia<sup>7</sup>.

Overstay sendiri adalah ketika warga negara asing melebihi masa tinggal sesuai ijin yang diberikan. Kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum yang mana kemudian akan dikenakan denda bahkan pendeportasian. Sebagian besar overstay dilakukan oleh mahasiswa asing yang mengenyam pendidikan di Indonesia dan angkanya cenderung meningkat. Hal yang mendasari mahasiswa melakukan overstay adalah karena kurangnya ketaatan untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Tentu saja ketidak tertiban administrasi keimigrasian ini mengganggu pada aspek kepedudukan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan keimigrasian untuk mengurangi tingginya kegiatan overstay di Kota Malang.

Keberadaan warga negara asing dapat menguntungkan Indonesia dalam hal menambah kekayaan keilmuan dibidang alih teknologi pada perusahaan dimana ia bekerja, karena sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berkewajiban

---

<sup>7</sup> Sri Wahyunik, Kantor Imigrasi Malang Deportasi 4 WNA dan Tangani Puluhan Pelanggaran, *Surya Malang*, 5 Mei 2018

memberikan kemampuan keilmuan yang berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan pihak asing atau pekerja asing. Namun keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia juga menjadi potensi ancaman bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang sendiri sebagai kota wisata, tidak menutup kemungkinan didapati pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Ditambah lagi dengan maraknya isu tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok yang juga dapat dijadikan contoh betapa pentingnya pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia. Adapun beberapa contoh pelanggaran disektor tenaga kerja asing di Indonesia diantaranya, tenaga kerja asing yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pembeli tenaga kerja asing tidak dapat dipastikan keberadaannya. Selain itu, masih ada tenaga kerja asing yang bekerja sebagai buruh kasar, dan tenaga kerja asing yang telah menjadi warga negara Indonesia namun tidak memiliki izin kerja.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional yang dikhawatirkan pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kesempatan kerja dan pasar kerja di Indonesia.

Hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing harus lebih dipertegas dan diperketat. Karena dengan melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing akan meminimalkan angka pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat kecamatan juga menjadi terobosan yang bagus bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang sehingga dapat mencegah terjadinya

---

<sup>8</sup> *Cnnindonesia.com*, Pengawasan Lemah, Pelanggaran Tenaga Kerja Asing Marak

pelanggaran warga negara asing yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Keimigrasian sebagai lembaga negara bekerja dengan lembaga terkait harus melakukan pengawasan terhadap wna yang menjadi tugas tanggung jawabnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kota Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan penindakan terhadap wargana negara asing di Kota Malang yang melakukan pelanggaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersadarkan pada rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini untuk di capai antarai lain:

1. Mengetahui prosedur pengawasan dan penindakan warga negara asing di Kota Malang.
2. Mengetahui dampak terhadap pelanggaran warga negara asing di Kota Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis.

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan mengenai pengawasan warga negara asing di tingkat kecamatan di Kota Malang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai pengawasan warga negara asing di tingkat kecamatan di Kota Malang.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan secara praktis melalui penelitian ini, yaitu:

### **a. Bagi Akademisi,**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Malang.

### **b. Bagi Instansi Terkait**

Penelitian ini bagi instansi terkait dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam hal pengawasan warga negara asing di tingkat kecamatan Kota Malang.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pengawasan warga negara asing di tingkat kecamatan di Kota Malang.

## **E. Definisi Konsep**

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.<sup>9</sup> Maka dari itu perlu didefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema sehingga pembaca dan peneliti memiliki pemahaman yang sama, yaitu:

### **1. Keimigrasian**

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Pasal 1 tentang Keimigrasian.

### **2. Warga Negara Asing**

Warga negara asing adalah orang yang menetap di suatu negara namun bukan merupakan warga asli negara yang bersangkutan. Biasanya keberadaan warga negara asing dikarenakan berbagai macam hal seperti liburan, pendidikan, bisnis dan keperluan-keperluan yang lainnya. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Maka selama orang asing berada di Indonesia dan bukan merupakan warga negara Indonesia orang asing tersebut disebut warga negara asing.

---

<sup>9</sup> Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

### **3. Keamanan Nasional**

Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 pada Pasal 1 ayat 1 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>10</sup>.

Keamanan nasional menunjuk pada kebijakan publik yang digunakan untuk memastikan keamanan pada suatu negara dari ancaman keamanan yang berasal dari negara-bangsa lainnya. Ancaman keamanan tersebut dapat juga berasal dari non-negara seperti kartel narkoba, perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah. Adapun penyakit menular dan bencana alam terdapat dalam kategori tersebut.

### **4. Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kegiatan keimigrasian di Indonesia yang dilakukan secara administratif dan operasional. Pengawasan administratif meliputi pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

---

<sup>10</sup> Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Pertahanan Negara

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:<sup>11</sup>

- a) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b) Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d) Pengambilan foto dan sidik jari;
- e) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- f) Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Kecamatan

Sedangkan secara operasional adalah dengan melakukan pengawasan di lapangan secara rutin dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.

## **5. Penindakan Keimigrasian**

Penindakan adalah tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang didapati melakukan pelanggaran keimigrasian. Penindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati peraturan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 6 tahun 2011 Pasal 68 ayat (1)

perundang-undangan yang berlaku<sup>12</sup>. Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran bisa secara administrative maupun pidana.

## **6. Pelanggaran Warga Negara Asing**

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat<sup>13</sup>

### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel yang diobservasi dapat diukur.<sup>14</sup> Adapun variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran warga negara asing di Kota Malang
  - a) Pemberian perpanjangan izin tinggal warga negara asing;
  - b) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;

---

<sup>12</sup> Undang Undang No. 9 Tahun 1992 Pasal 42 ayat (1)

<sup>13</sup> Hasan, Alan. 2015. Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia.

<sup>14</sup> Darsono Wisadirana, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*, Malang: UMM Press



- c) Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
  - d) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Kota Malang;
  - e) Pengambilan foto dan sidik jari;
  - f) Pemantauan dan penyelidikan melalui wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejak, penyusupan, penggunaan informasi ;
  - g) Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Kecamatan
2. Penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Kota Malang
- a) Tindakan hukum administratif yang diberlakukan terhadap warga negara asing yang melebihi batas tinggal yaitu berupa denda sebesar Rp 300.000 per hari dan pendeportasian terhadap warga negara asing yang tidak bisa membayar denda.
  - b) Penampungan warga negara asing yang dilakukan pada rumah detensi imigrasi (RUDENIM) bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran
  - c) Tindakan hukum pidana berupa pendeportasian dan pencekalan warga negara asing yang melakukan tindak pidana kejahatan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dalam penulisannya akan menggunakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak melalui atau menggunakan ukuran angka. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam penelitian ini disajikan dengan kata-kata maupun lisan sesuai dengan pendapat Creswell (1995) yang menyatakan bahwa penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci, yang diperoleh dari para sumber informasi dan dilakukan dalam latar yang alamiah.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan menguraikan data dari berbagai sumber informasi yang dalam penelitian ini menggunakan pelaksanaan Tim Pengawasan Orang Asing di tingkat kecamatan sebagai objeknya. Hal ini kemudian akan diklasifikasikan, dianalisa dan kemudian disimpulkan sebagai hasil dari penelitian.

### **2. Sumber Data**

Peneliti membedakan data dengan sumbernya menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

---

<sup>15</sup> Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara. (hlm. 83)

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang digunakan pertama kali oleh peneliti untuk menemukan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan penelitian terhadap informan yang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan penelitian melalui observasi dan dokumentasi di lapangan yang dalam hal ini akan didapatkan melalui pengamatan dari tampilan keadaan pada seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan beberapa kecamatan di Kota Malang.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan peneliti melalui kajian literasi yang ada didalam jurnal, buku, internet, media cetak, arsip dan lain sebagainya. Data-data yang diperoleh tersebut nantinya digunakan peneliti untuk menguatkan data primer yang sudah ada.

1. Orang, adalah sumber data yang dalam memberikan data ataupun informasi dan jawaban yang dibutuhkan peneliti melalui wawancara ataupun jawaban yang tertulis. Penelitian ini akan menggunakan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan beberapa Kepala Kecamatan di wilayah Kota Malang
2. Tempat atau lokasi adalah sumber data yang dapat menyajikan data melalui pengamatan dari tampilan keadaan tempat atau lokasi

penelitian. Tempat atau lokasi dalam penelitian ini adalah seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang, dan beberapa Kantor Kecamatan di Kota Malang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

#### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian. Dalam hal ini observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002). Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan mencatat fenomena yang muncul dalam hal pengawasan warga negara asing di wilayah Kota Malang.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan peneliti dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya adalah sebagai pedoman dalam wawancara. Pertanyaan yang diajukan nantinya akan dikembangkan sesuai dengan kondisi data dan informasi yang didapat. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman dari daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait tentang pengawasan warga negara asing di Kota Malang.

### **c. Dokumentasi**

Menurut Gottschalk (1986: 38) secara luas dokumentasi adalah berupa proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Dalam penelitian ini data tersebut dapat berupa data statistik jumlah warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Malang, jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang pengawasan warga negara asing dan yang melalui Tim Pengawasan Orang Asing.

### **4. Subjek Penelitian**

Agar mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini maka diperlukan subjek penelitian. Adapun yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah orang-orang atau yang kemudian di sebut informan yang dianggap dapat memberikan informasi tentang sesuatu yang sedang diteliti. Informan yang dimaksud tersebut adalah:

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Malang;
2. Kepala Kecamatan di Kota Malang dan;
3. Tim Pengawasan Orang Asing ditingkat Kecamatan di Kota Malang.

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan agar penelitian menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti melukan

penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan beberapa kecamatan di Kota Malang.

## **6. Analisis Data**

Miles & Hubberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu<sup>16</sup>:

### **a. Reduksi data (*data reduction*)**

Mereduksi berarti merangkup hal-hal pokok, memilih hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Data-data yang didapat dari lapangan harus di saring sesuai dengan pola tema yang digunakan. Data yang didapat dari subyek penelitian akan di reduksi agar tiap permasalahan dari perumusan tema dapat ditarik kesimpulan dengan lebih akurat.

### **b. Paparan data (*data display*)**

Pemaparan data dilakukan untuk memperjelas pemahaman terhadap kasus yang teliti, dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan data yang diperoleh melalui sumber data. Data penelitian ini kemudian akan dipaparkan berupa uraian dan dukungan matriks jaringan pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

---

<sup>16</sup> Gunawan, Imam. Ibid, (hlm. 210)

**c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)**

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jika data yang didapat dari temuan-temuan pengumpulan data berikutnya bertentangan dengan kesimpulan maka akan dirubah karena kesimpulan tersebut masih bersifat sementara sebelum mendapat verifikasi.

